**MAKALAH**

**ORGANISASI PROFESI KEGURUAN**

Dosen Pengampu: Giyanti, S.Pd M.Pd



Oleh:

1. Devi Nurkomalasari (71119005)
2. Devy Permatasari (71118015)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**

**FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SERANG RAYA**

**2021**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **Organisasi Profesi Keguruan** guna memenuhi tugas dari Ibu Giyanti.

Dalam penyusunan Makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan Makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

**Serang, 16 Oktober 2021**

**Kelompok 5**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Guru merupakan peran penting dalam keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Guru sebagai pendidik professional harus mempunyai citra yang baik dalam masyarakat agar dapat menunjukkan bahwa ia adalah panutan yang layak dan teladan. Selain itu guru juga dituntut untuk memasuki organisasi profesi kependidikan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya demi mewujudkan komitmen dalam melakukan pembenahan pola pendidikan agar mencapai mutu yang sesuai harapan.

Penyusunan makalah ini merupakan bentuk respon terhadap program kebijakan di bidang pendidikan, mengingat betapa pentingnya peran guru yang professional serta berpengalaman yang tinggi,sehingga segala yang dicita-citakan bersama tercapai dimana guru mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan melalui wujud keprofesian dan pengalaman yang tidak diragukan lagi.

Oleh karena itu pada makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai organisasi profesi keguruan.

* 1. **Rumusan Masalah**

1. Apakah pengertian organisasi profesi keguruan?
2. Apa tujuan organisasi profesi keguruan?
3. Apasaja fungsi organisasi keguruan?
4. Apasaja bentuk organisasi profesi keguruan?
5. Bagaimana organisasi profesi keguruan menurut ruang llingkup pendidikan?
   1. **Tujuan**
6. Mengetahui pengertian organisasi profesi keguruan
7. Mengetahui tujuan dari organisasi profesi keguruan
8. Menetahui fungsi organisasi profesi keguruan
9. Mengetahui bentuk-bentuk organisasi profesi keguruan
10. Mengetahui organisasi menurut ruang lingkup organisasu keguruan menurut ruang lingkup pendidikan

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1. Hakikat Organisasi Profesi Keguruan**

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Dalam UU guru dan dosen No.14/2005 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi bukan sekedar pekerjaan, melainkan suatu pekerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri, keahlian, tanggung jawab. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan (Dr. Umar Sidiq, 2018). Undang-undang tersebut juga mengatur prinsip profesionalitas seorang pendidik. Salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah guru harus memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, organisasi profesi guru tidak hanya sekadar organisasi untuk berkumpul guru, melainkan juga organisasi amanat undang-undang.

Secara konseptual, istilah profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut (Arifa & Prayitno, 2019). Sementara menurut Hosnan (2016: 111) profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan. Sebagai sebuah profesi, guru telah mendapat pengakuan dari negara dan masyarakat. Sebagai bidang pekerjaan khusus, profesi guru menuntut adanya spesifikasi keahlian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Salah satu bentuk pengakuan negara terhadap guru adalah ditetapkannya tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional berdasarkan Keppres. No. 78 tahun 1994.

Organisasi sebagai arena perserikatan orang-orang yang beraktivitas, aktivitas orang-orang tersebut terarah kepada pencapaian tujuan. Narayanan dan Raghu Nath menyatakan bahwa *“An organization can be defined as an arena where human beings come together to perform complex tasks, so as to fulfill common goal’s.”* Kajian tentang organisasi tidak hanya pada perkumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga semua aspek yang mempengaruhi eksistensi, perkembangan dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain: rincian dan susunan tugas, barang dan mesin, teknologi, informasi dan sumber-sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu sistem.

Robbins mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Karena organisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan keberlebihan (redundancy) namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan. Hasilnya adalah bahwa definisi kita mengasumsikan secara eksplisit kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi manusia.

Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan dan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru – guru di negara kita, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Berdiri di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai wujud aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita- cita perjuangan bangsa. Salah satu tujuan PGRI adalah meningkatkan kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatakan kesejahteraan mereka.

**2.2. Tujuan Organisasi Profesi Keguruan**

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa organisasi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Sifat organisasi guru adalah independen dan fungsinya adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan organisasi profesi sangatlah penting bagi profesi itu sendiri, sebab ciri profesi diantaranya memiliki organisasi profesi. Termasuk dalam hal ini profesi guru. Oleh sebab itu organisasi profesi guru perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi dengan baik.

Keberadaan organisasi profesi sangat penting bagi profesi itu sendiri dengan tujuan:

* + 1. Meningkatkan harkat dan martabat profesi.
    2. Alat pemersatu sesama anggota profesi.
    3. Memajukan kompetensi anggota profesi dengan wadah organisasi profesi tersebut.
    4. Meningkatkan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota profesi.
    5. Meningkatkan dan melindungi karier anggota profesi.

Salah satu tujuan organisasi untuk meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru. Sebagimana telah tercantum dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 ada lima misi dan tujuan organisasi profesi pendidikan yaitu :

* + 1. Meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota

Merupakan upaya mengembangkan karir anggota sesuai bidangnya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi diirnya maupun orang lain.

* + 1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota

Merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi akan meningkatkan kemampuannya.

* + 1. Kewenangan professional

Merupakan upaya untuk menempatkan anggota sesuai kemampuannya.

* + 1. Meningkatkan dam mengembangkan martabat anggota

Merupakan upaya agar anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai kemanusiaan.

* + 1. Meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan.

upaya nuntuk meningkatkan kesejahteraaan lahir dan batin anggotanya. Dalam teori maslow, kesejahteraan menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Sedangkan visi organisasi profesi kependidikan secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional.

**2.3. Fungsi dan Peranan Organisasi Keguruan**

Pengembangan profesi guru merupakan suatu proses kegiatan untuk menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan pengajaran. Pengembangan profesi guru adalah peningkatan kualitas profesi guru. Suatu profesi bila ingin maju. Organisasi pedidikan memiliki ciri-ciri suatu profesi yang terdapat dalam pekerjaan sebagai pendidik (guru). Sesuai dengan hakikat profesi dan ciri-cirinya, dapatlah diterima bahwa jabatan kependidikan/keguruan merupakan suatu profesi (Putri & Imaniyati, 2017). Di Indonesia terdapat organisasi profesi pendidikan yang berfungsi sebagai pemersatu seluruh guru dalam profesi keguruan agar mampu menjalankan tugas keprofesian dan meningkatkan profesioanal profesinya. Adapun beberapa fungsi organisasi profesi keguruan sebagai berikut :

* + 1. Sebagai Pemersatu Keguruan

Organisasi profesi 5 kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbgai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna-pengguna jasa pendidikan. Organisasi profesi diharapkan mempersatukan potensi sehingga memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakkan dan melakukan tindakan bersama. Upaya ini untuk melindungi dan memperjuangankan kepentingan para pengemban profesi pendidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 Tahun 1992, Pasal 61 yang berbunyi, “Tenaga pendidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.” PP tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan berdasarkan kurikulum 1994 dapat dilakukan dua program,yaitu program terstuktur dan tidak terstuktur program terstruktur yaitu program yang dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa yang berisi bahan dan produk kegiatan belajar yang dapat diakreditasikan secara akademik dalam jumlah SKS. Program Program tidak terstuktur yaitu program pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai tuntutan waktu dan lingkungan yang ada. Terlingkup dalam program tidak terstruktur ini adalah :

* + - 1. Penataran tingkat nasional
      2. Supervisi
      3. Pembinaan dan pengembangan sejawat
      4. Pembinaan dan pengembangan individual
    1. Sebagai Peningkatan Kompetensi Keguruan

Merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan.Menurut Johnson kompetensi dibangun oleh 6 perangkat kompetensi berikut ini.

* + - 1. *Performance component*, yaitu unsur kemampuan penampilan kinerja yang sesuai dengan profesi kependidikan.
      2. Subject Component, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan/substansi pengetahuaan yang relevan.
      3. *Profesional Component*, yaitu kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis profesi kependidikan.
      4. *Process Component*, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses mental mencakup berfikir logis dalam pemecahan masalah.
      5. *Adjustment Component*, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pendidik.
      6. *Attitudes Component*, yaitu unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pendidik atau guru.

Aktivitas pemeliharaan maupun penyesuaian selalu dibutuhkan agar sistem dapat mempertahankannya. Organisasi yang stabil dan dipelihara dengan baik, namun jika tidak menyesuaikan diri ketika kondisi berubah, maka tidak akan bertahan lama. Demikian pula, organisasi yang adaptif tetapi tidak stabil akan menjadi tidak efisien dan kemungkinan juga tidak dapat hidup lama. Sebagai suatu organisasi, asosiasi profesi keguruan menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Dalam praktik keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan regulasi yang telah ditetapkan organisasi, maka akan diperingatkan, atau bahkan dipecat. Jadi, dalam suatu organisasi profesi ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi pada dasarnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban di bidang pekerjaan masing-masing. Motif dasar kelahiran sebuah organisasi bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri (secara instrinsik) dan/atau karena tuntutan dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik secara sosial-psikologis maupun secara ekonomis-kultural. Selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atas semangat pengabdian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin (perpeksionis, filantropis). Sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar (masyarakat pengguna jasanya), adanya persaingan, serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di berbagai negara yang tergolong maju, kelahiran beberapa organisasi asosiasi yang dewasa ini tergolong sudah mapan (kedokteran, kehakiman, kependetaan, dan sebagainya) ternyata telah muncul semenjak beberapa abad yang lampau. Sementara di bidang pendidikan, khususnya jabatan guru, baru dimulai semenjak awal abad kedua puluh ini. Di USA misalnya, *The American Federation of Teachers*, baru berdiri pada tahun 1916 di tengah berkecamuknya Perang Dunia I sebagai penyatuan dari pelbagai organisasi asosiasi guru dan tenaga kependidikan yang sebenarnya telah berdiri sebelumnya tetapi bersifat lokal dan sektoral, seperti asosiasi guru-guru di negara bagian Chicago yang terkenal amat vokal dan berpengaruh dalam upaya pengembangan sistem pendidikan di negara tersebut. Demikian juga, di berbagai negara tetangga ternyata telah berdiri semenjak dekade dua puluhan dan tiga puluhan, seperti Bangladesh (1921), Australia (1926), Philipina (1932), dan Cina (1933). Sedangkan di Indonesia, PGRI, baru lahir 25 Nopember 1945 sebagai fusi dari berbagai organisasi guru yang pernah berkembang semenjak zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang semula bersifat lokal dan parsial.

Secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu, selain melindungi kepentingan para anggota, kemandirian, dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan menegakkan kode etik), juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karier, kompetensi, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan para anggotanya.

**2.4. Bentuk-bentuk Organisasi Profesi**

Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan/dan antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain:

2.4.1. Persatuan (Union), antara lain; Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Australian Education Union, Singapore Teacher’s Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teacher’s Union.

2.4.2. Federasi (Federation), antara lain: All India Federation of Teachers Organisations, Bangladesh Teachers’ Federation, Federation of Elementary Education Teachers’ Association of Thailand.

2.4.3. Aliansi (Alliance), antara lain: Alliance of Concered Teachers, Philipina

2.4.4. Asosiasi (Association) yang terdapat di kebanyakan Negara.

Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya juga menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti

menurut:

2.4.1. Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi).

2.4.2. Status penyelenggara kelembagaan pendidikan (Negeri dan Swasta)

2.4.3. Bidang studi/keahlian (guru Bahasa Inggris, Matematika, dan sebagainya)

2.4.4. Gender (wanita, pria)

2.4.5. Latar belakang Etnis (Cina, Melayu, dan sebagainya).

Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga beragam dan bersifat:

242.1. Lokal (Kedaerahan, Kewilayahan)

2.4.2. Nasional (Negara)

2.4.3. Internasional (WCOTP, WFTU, dan sebagainya).

Dengan demikian, keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan.Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja.

**2.5. Organisasi Profesi Guru Menurut Ruang Lingkup Pendidikan**

Profesi guru, meskipun telah diminati masyarakat dengan adanya perbaikan melalui program sertifikasi, tidak menjamin bahwa guru tersebut sudah profesional. Hal ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, di antaranya kualifikasi pendidikan formal guru belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, kekurangan guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan masih cukup banyak, distribusi guru belum merata, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya, kesejahteraan pendidikan belum optimal dan penghargaan terhadap pendidikan sangat minim. Oleh karena itu, dibentuklah organisasi profesi menurut ruang lingkup pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya: MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), KKG (Kelompok Kerja Guru), KKM (Kelompok Kerja Madrasah), dan beberapa organisasi lain. Dalam upaya pengembangan kompetensi profesionalisme guru, di antaranya dapat melalui optimalisasi fungsi dan peran kegiatan dalam beberapa organisasi tersebut yang memungkinkan para guru berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya.

2.5.1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI sebagai organisasi profesi keguruan, memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. *Menjaga* artinya berupaya agar layanan pendidikan mutunya dapat di pertanggung jawabkan secara profesional. *Memelihara* artinya mengupayakan profesi kependidikan dari pencemaran. *Mengembangkan* berarti berupaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru.

Persatuan Guru Republik Indonesia lahir pada 25 November 1945, Cikal bakal Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada saat didirikannya organisasi ini disamping memiliki misi politis ideologi tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia juga penanaman nilai luhur filsafah hidup berbangsa dan bernegara yaitu pancasila.

Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioneer pendidikan sehingga di tuntut oleh UUSPN tahun 1989 : pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya.

PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Dengan demikian PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru Indonesia. Artinya PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat lebih jauh lagi Bangsa dan Negara. Misi profesi juga ada misi lainnya, yaitu misi politis-ideologi, misi peraturan oragnisasi, misi profesi dan misi kesejahteraan.

2.5.2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMP/SMA/SMK negeri dan swasta, baik yang berstatus PNS maupun swasta dan/atau guru tidak tetap (honorarium). Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan “dari, oleh, dan untuk guru” dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi non-struktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain. MGMP merupakan salah satu jenis organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini selain PGRI. MGMP didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis. Hakikat MGMP berfungsi sebagai wadah atau sarana komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman. MGMP ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wadah komunikasi profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan, wawasan, serta pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya.

Organisasi MGMP ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik. Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dalam MGMP ini dengan PGRI.

Secara khusus, Zulaichah mengemukakan bahwa tujuan

diselenggarakannya MGMP yaitu :

2.5.2.1. Untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinanan diri sebagai guru profesional.

2.5.2.2. Untuk menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatkan pemerataan mutu pendidikan.

2.5.2.3. Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan

karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya.

2.5.2.4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan.

2.5.2.5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil loka karya, simposium, seminar, diklat, classromm action reseach, referensi dan lain-lain, yang merupakan kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama.

2.5.2.6. Mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (school reform), khususnya focus classroom reform, sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif.

Tujuan MGMP secara umum adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

* + - 1. Memperluas wawasan dan pengtahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.
      2. Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasikan, dan mencerdaskan.
      3. Membangun kerjasama dengan masyrakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

MGMP dituntut untuk berperan sebagai: (1) *Reformator* dalam *classroom*, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif. (2) *Mediator,* dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujian. (3) *Supporting agency,* dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah. (4) *Collaborator,* terhadap unit terkait dan organisasi profesi relevan. (5) *Evaluator* dan *development school* *reform*  dalam konteks MGMP, dan (6) *Clinical* dan *academic supervisor* dengan pendekatan penilaian *appraisal.*

Melalui wadah musyawarah guru diharapkan persoalan dapat di atasi, termasuk bagaimana mengembangkan KTSP atau Kurikulum 2013 dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, mencari alternatif pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai variasi metode, dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Wadah musyawarah guru juga dapat menyusun dan mengevaluasi perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi kemajuan dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan rencana berikutnya. Kegiatan wadah guru yang dilakukan dengan intensif, dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan diri guru untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang diajarkan. Melalui revitalisasi wadah musyawarah guru, diharapkan semua kesulitan dan permasalahan dapat dipecahkan, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif (*efective instruction*).

2.5.3. Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelompok kerja guru (KKG) adalah forum komunikasi kerja guru, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Forum ini memiliki tugas dan fungsi untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan menciptakan iklim yang kondusif agar para guru dapat berkreasi di dalamnya. Forum ini juga harus mampu membantu kelancaran pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan pendidikan pada umumnya. Peserta KKG mempunyai tugas untuk merumuskan dan memecahkan pelbagai masalah yang dihadapi di sekolah dalam peningkatan layanan kepada peserta didik. Berbagai permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan pembelajaran, diagnostik kesulitan belajar,

permasalahan yang berhubungan dengan komite sekolah, orang tua peserta didik, dan dengan masyarakat pada umumnya. Memperhatikan hal tersebut, dirasakan perlunya pembinaan yang tepat terhadap para guru yang terlibat dalam KKG.

Ratna Julia mendefinisikan Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai wadah dalam pembinaan profesional guru yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi, bertukar fikiran dan berbagi pengalaman, melaksanakan berbagai demonstrasi, atraksi dan simulasi dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Din Wahyudin, KKG merupakan wadah profesional guru yang aktif, kompak dan akrab. Di dalam wadah ini para guru dapat membahas permasalahan dari mereka dan untuk mereka. Jika MGMP diselenggarakan pada lingkup SMP/MTs/SMA/MA/SMK, maka KKG ini lebih khusus pada lingkup SD/MI, dan dilaksanakan pada tiap gugus.

Tujuan KKG adalah sebagai upaya pembinaan profesional guru melalui kegiatan yang terencana dengan tujuan yang cukup jelas. Tujuan KKG secara khusus adalah: (1) sebagai wadah kerjasama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar; (2) untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat kompetitif di kalangan anggota gugus dalam rangka maju bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar; (3) sebagai sarana pembinaan profesional bagi guru; (4) sebagai wadah penyebaran inovasi khususnya di bidang pendidikan.

Ruang lingkup kegiatan KKG, meliputi: (1) Pemecahan masalah pembelajaran; (2) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar peserta didik; (3) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan orang tua peserta didik; (4) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan komite sekolah; (5) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan masyarakat; (6) Pemecahan masalah yang dihadapi guru terutama dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2013, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (7) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar proses; (8) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi simulasi; (9) Pemecahan masalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) sekolah yang berkaitan dengan penyampaian informasi penting untuk diketahui guru dan tenaga kependidikan lainnya; (10) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyusunan materi pembelajaran secara rinci; (11) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendekatan dan metode Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM); dan (12) Pemecahan masalah yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran.

Apabila ditinjau dari tujuan dan peran KKG seperti di atas, KKG adalah suatu wadah yang strategis untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Tetapi melihat kenyataan di lapangan, keberadaan KKG masih banyak keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat terlihat dari sumber daya manusia, keterlibatan pengurus dan peserta belum optimal, dana operasional yang terbatas, koordinasi antar KKG Mata Pelajaran di tiap SD/MI serta perhatian dari *stakeholder* pendidikan masih belum optimal. Melihat keterbatasan yang ada, perlu kiranya semua pihak yang terlibat dan *stakeholder* pendidikan berpacu mengatasi secara bersama-sama agar semua keterbatasan yang ada dalam organisasi KKG dapat dicarikan jalan pemecahannya. Jika dicermati, tampaknya dana menjadi problem serius bagi pengurus KKG dalam menjalankan program, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Bagaimana mungkin guru mata pelajaran mampu mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya kalau tidak pernah diajak untuk berkiprah mengikuti kegiatan-kegiatan KKG secara cerdas, kreatif, dan mencerahkan.

Kegiatan tutorial dilaksanakan berpijak pada gagasan pokok bagaimana caranya agar kegiatan KKG dapat berjalan secara terus-menerus, tanpa menunggu pembinaan hierarkis “dari atas”. Dalam kegiatan KKG, peran tutor sangat menentukan di dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Hal ini karena seorang tutor merupakan tenaga guru potensial yang bertugas secara penuh memberikan bantuan profesional kepada teman-teman sejawat (guru). Dinamis tidaknya pelaksanaan KKG dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan KKG, baik interaksi antara guru dengan guru peserta KKG, tutor dengan guru, dan tutor dengan tutor. Dalam konteks yang lebih aplikatif, tutor berperan sebagai ‘guru’ sedangkan guru peserta KKG berperan sebagai ‘siswa’.

Guru SD/MI adalah guru yang harus mampu menyampaikan bahan ajar dari seluruh mata pelajaran, kecuali pendidikan olahraga, agama, dan kesenian, sehingga ada yang menjulukinya “Superman” yang serba bisa, habis nangis terus tertawa, kemudian bernyanyi, berlari, tepuk tangan, dan seterusnya. Inilah kondisi guru sekolah dasar kita yang minimal harus menguasai materi delapan mata pelajaran sehingga mereka harus mengikuti delapan kegiatan sesuai mata pelajaran yang ada, karena ini KKG kelas dengan penekanan pada mata pelajaran tertentu. Di samping kelompok kerja, ada juga Pusat Kegiatan Guru (PKG) sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan guru dan memecahkan pelbagai permasalahan, yang terdapat di suatu sekolah atau tempat lain yang ditentukan oleh musyawarah para tenaga kependidikan dalam KKG.

2.5.4. Kelompok Kerja Madrasah (KKM)

KKM adalah badan yang membina hubungan kerjasama secara koordinatif antara Madrasah negeri dengan Madrasah swasta menurut tingkatan masing-masing dalam wilayah pembinaan yang ditetapkan.115 Kelompok Kerja Madrasah terdiri dari:

2.5.4.1. Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKM lbtidayah).

2.5.4.2. Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKM Tsanawiyah).

2.5.4.3. Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKM Aliyah).

Kelompok Kerja Madrasah lbtidayah, Tsanawiyah dan Aliyah berkedudukan di tiap-tiap madrasah yang dipersamakan atau Kantor Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya yang menjadi penyelenggaraan ujian negara.

Tugas pokok KKM antara lain:

2.5.4.1. Mengkoordinasikan perincian pelaksanaan tugas dari pedoman peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.5.4.2. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program tahunan madrasah secara terpadu dan perencanaan program pengajaran yang meliputi penggunaan kurikulum, perencanaan program pengajaran pada setiap tahun ajaran.

2.5.4.3. Mengkoordinasikan kesatuan langkah dalam menetapkan bahan pelajaran dan buku serta alat pelajaran lainnya.

2.5.4.4. Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan metode pendidikan guna menyusun satuan pelajaran.

2.5.4.5. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada setiap semester/kenaikan kelas dan ujian akhir.

2.5.4.6. Menyelenggarakan rapat pertemuan guru-guru bidang studi sejenis dalam wilayah kerja masing-masing guna mengembangkan masing-masing bidang studi yang dipertanggung jawabkannya, terutama mengenai perumusan tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, metode, dan pengembangan alat pelajaran.

2.5.4.7. Menyelenggarakan rapat koordinasi kepala madrasah dalam usaha mencapai uniformitas dalam pembinaan.

2.5.4.8. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kependidikan seperti kepramukaan, usaha kesehatan sekolah, koperasi, cinta alam, widya wisata, pembinaan syiar agama dan lain-lain.

2.5.5. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI)

IGTKI adalah organisasi guru-guru Taman Kanak-kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Taman Kanak-kanak. Organisasi ini adalah organisasi profesi guru Taman Kanak-kanak yang *independent.* Pada awalnya TK adalah kepunyaan pribadi dan penyelenggara-penyelenggaranya mengajar sendiri. Untuk itu pada tanggal 20 Mei 1949 Ibu Maryam, Ibu Winoto, dan Ibu Sudardjo mendirikan PGTK serta membuat naskah ujian untuk sekolah para guru TK dan pada waktu itu di Jakarta sudah ada sekolah guru TK yang dipimpin oleh ibu Lestari. Pada tanggal 22 Mei 1950 berkumpullah 36 guru TK untuk membentuk pengurus PGTK dan hari itu diputuskan sebagai hari berdirinya PGTK dengan tujuan: (1) Mempersatukan semua guru TK; (2) Mengadakan aplikasi khusus; (3) Menyeragamkan daftar pelajaran; (4) Menyelenggarakan aktivitas-aktivitas ke arah kemajuan. Kemudian, pada tanggal 24 Mei 1994 PGTKI diganti namanya menjadi IGTKI.

Pembina organisasi IGTKI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Visi IGTKI adalah membentuk tenaga pendidik yang berkualitas. Misi dari organisasi ini antara lain adalah melaksanakan berbagai pelatihan, workshop, dan seminar yang menunjang profesionalisme tenaga pendidik dan membentuk watak anak bangsa. Semua kegiatan IGTKI diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk anak-anak pra sekolah. Sedangkan tujuan dan manfaat IGTKI antara lain:

2.5.5.1. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.5.5.2. Membela, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

2.5.5.3. Mempersatukan semua guru TK Indonesia, guna meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam pendidikan nasional khususnya di bidang pendidikan TK.

2.5.5.4. Mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan terkait dan organisasi kemasyarakatan umumnya, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan TK.

2.5.5.5. Membela, mempertahankan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional (UU No. 20/2003).

2.5.5.6. Membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

2.5.5.7. Membina dan mengembangkan mutu kader organisasi.

2.5.5.8. Mempertahankan fungsi TK sebagai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dalam jalur pendidikan formal.

2.5.5.9. Melaksanakan pendidikan TK sesuai dengan usianya.

2.5.5.10. Membina dan meningkatkan kesejahteraan guru TK dalam arti luas.

2.5.6. Ikatan Guru Raudhatul Athfa (IGRA)

Hampir sama dengan IGTKI, hanya saja IGRA ini khusus untuk para pengelola dan pendidik Taman Kanak-kanak Islam (Raudhatul Athfal). IGRA didirikan oleh Kepala dan Guru RA se-Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2002 di Bogor untuk masa yang tidak ditentukan. Pimpinan organisasi tingkat pusat berkedudukan di Jakarta.

Tujuan IGRA adalah: (1) Menyamakan visi, misi dan persepsi RA; (2) Memelihara dan mempererat tali silaturrahmi antara kepala dan guru RA; (3) Memelihara dan meningkatkan wawasan dan profesionalisme kepala dan guru RA; (4) Memelihara dan meningkatkan aktivitas serta dedikasi kepala dan guru RA. Sedangkan fungsi IGRA antara lain: (1) Mendorong dan memprakarsa pembaharuan dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan proses pembelajaran; (2) Menampung dan menyatukan aspirasi anggota; (3) Menyelenggarakan usaha kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan anggota.

2.5.7. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)

HIMPAUDI adalah wadah organisasi profesi yang bersifat idependen yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat berusaha secara berdaya guna dan berhasil guna, serta menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia.

Tujuan dan manfaat HIMPAUDI antara lain:

* + - 1. Menampung, memperjuangkan, dan mewujudkan aspirasi, para penyelenggara, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menjadi anggotanya
      2. Meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan PAUD sebagai sarana untuk pengembangan profesi guru
      3. Membantu Anak Usia Dini (AUD) dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal
      4. Mensosialisasikan pentingnya PAUD yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat
      5. Menyiapkan generasi yang berkualitas untuk membangun bangsa
      6. Mengupayakan kesejahteraan para pendidik PAUD
      7. Melindungi hak-hak para pendidik PAUD

Realita di lapangan masih banyak lembaga PAUD di daerah yang belum memiliki gedung, tenaga pendidik tersendiri yang khusus menangani lembaga tersebut, juga sarana dan prasarana lainnya (seperti alat permainan edukatif) pun belum ada. Oleh sebab itu, dengan lahirnya HIMPAUDI ini, yang bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, dapat berperan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 54, disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan harus dilaksanakan dengan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Direktorat PTK-PNF mengemban misi, antara lain: mengupayakan pemerataan layanan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal, sehingga dapat mengelola dan menyelenggarakan program peningkatan mutu PTK-PNF, khususnya pendidik PAUD pada jalur pendidikan non formal. Karena PAUD sebagai jenjang pendidikan yang sangat penting dalam mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan dasar dan perlu dikelola secara efektif dan efisien. Maka dari itu pendidik PAUD dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dan memiliki kemampuan teknis yang handal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggara PAUD yang berkualitas.

2.5.8. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an.

Pada awal profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di jakarta 17-19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu :

Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh indonesia.

* 1. Meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya.
  2. Membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan Bangsa dan Negara.
  3. Mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu seni dan teknologi pendidikan.
  4. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota.
  5. Meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesilisasi pendidikan.
  6. Menyelenggarakan akan komunikasi antar organisasi yang relevan.

2.5.9. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Oragnisasi ini merupakan himpunan para tugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Secara rinci tujuan didirikannya IPBI adalah sebagai berikut :

* + 1. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.
    2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik alat dan fasilitas yang telah di kembangkan di indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknnya.
    3. Meningkatkan mutu profesi bmbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

2.5.10. Muhammadiyah yang didirikan oleh (KH. A. Dahlan 1869-1923)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Muhammadiyah yang didalamnya diajarkan pelajaran agama dan umum. Model pendidikan Muhammadiyah ini merupakan perpaduan antara sistem sekolah model Belanda dan pesantren.

Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni

* + - 1. Bidang Keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu’amalah
      2. Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang beroerientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren
      3. Bidang social kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, poliklinik, apotik dan panti asuhan anak yatim
      4. Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma’ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.
  1. **Ruang Lingkup Organisasi Profesi**
     1. Gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional

mencakup hal-hal berikut :

* + - 1. Pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi (structure, concepts and ways of knowing).
      2. Penguasaan bidang studi sebagai objek belajar.
      3. Pengetahuan tentang karakteristik/perkembangan belajar.
      4. Pengetahuan tentang berbagai model teori belajar (umum maupun khusus).
      5. Pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar (umum dan khusus).
      6. Pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses belajar.
      7. Pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi.
      8. Pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
      9. Pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar.
      10. Pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaatnya.
      11. Penguasaan teknik mengamati proses belajar mengajar.
      12. Penguasaan berbagai metode mengajar
      13. Penguasaan teknik menyusun instrumen penilaian kemajuan belajar.
      14. Penguasaan teknik perencanaan dan pengembangan program belajar mengajar.
      15. Pengetahuan tentang dinamika hubungan interaksi antara manusia, terutama dalam proses belajar mengajar.
      16. Pengetahuan tentang sistem pendidikan sebagai bagian terpadu dari sistem sosial negara-bangsa.
      17. Penguasaan teknik memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses pengambilan keputusan.
    1. Gugus kemampuan professional, mencakup:
       1. Merencanakan program belajar mengajar
          1. Merumuskan tujuan-tujuan instruksional
          2. Menguraikan deskripsi satuan bahasan
          3. Merancang kegiatan belajar mengajar
          4. Memilih media dan sumber belajar
          5. Menyusun instrumen evaluasi
       2. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar
          1. memimpin dan membimbing proses belajar mengajar
          2. mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar
          3. menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar
       3. Menilai kemajuan belajar
          1. memberikan skor atas hasil evaluasi
          2. mentransformasikan skor menjadi nilai
          3. menetapkan rangking
       4. Menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan

**BAB III**

**PENUTUP**

**3.1. Kesimpulan**

Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan dan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru – guru di negara kita, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Berdiri di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai wujud aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita- cita perjuangan bangsa. Salah satu tujuan PGRI adalah meningkatkan kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatakan kesejahteraan mereka. Fungsi organisasi profesi keguruan sebagai pemersatu keguruan menjadi wadah pemersatu berbgai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna- pengguna jasa pendidikan, sedangkan fungsi organisasi profesi keguruan sebagai peningkatan kompetis i keguruan bertujuan untuk meningkatkan kecakapan atau kemampuan kompetensi dalam 6 perangkat kompetensi menurut Johnson. Tujuan dari pada adanya organisasi profesi keguruan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru sebagimana telah tercantum da lam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 ada lima misi dan tujuan organisasi profesi pendidikan. Di Indonesia banyak sekali jenis-jenis organisasi p rofesi keguruan, diantaranya PGRI, ISPI, MGMP, organisasi pendidikan Muhammadiyah, dan lain-lain. Ruang lingkup dari organisasi profesi keguruan ini mencakup gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar professional.

**DAFTAR PUSTAKA**

Elvianasti, Mega.2020/2021.*MODUL PROFESI PENDIDIKAN*.

Imron Fauzi.*Etika Profesi Keguruan.*Jember: IAIN Jember Press,2008.

Lusi Nopy Yanti.25 Desember 2017.*Organisasi Profesi Keguruan*. <https://lusinopyyanti.wordpress.com/2017/12/25/organisasi-profesi-keguruan/>.

Diakses pada 16 Oktober 2021 pukul 21.18 WIB

Nurhadi, Ali. 2017.*PROFESI KEGURUAN Menuju Pembentukan Guru Profesional.* Kuningan: Goresan Pena

Serelicious.6 maret 2021.*Organisasi Keguruan Yang Ada Di Indonesia.* [*https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/organisasi-profesi-guru/*](https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/organisasi-profesi-guru/)*.*

Diakses pada 8 November 2021 pukul 05.30 WIB.